

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA PROV. SULAWESI SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 sudah dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang dibuat untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 berjalan, serta sebagai bahan evaluasi untuk tahun anggaran kedepannya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini ini tidak luput dari kesalahan dan ketidaksempurnaan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat diperlukan untuk penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dimasa akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dibuat untuk menjadi bahan seperlunya.

Makassar, Januari 2023



KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

IQBAL NADJAMUDDIN, SE

Pangkat : Pembina

Nip. : 19740701 200212 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Maksud dan Tujuan 1

1.3 Gambaran Umum Organisasi..... 2

1.4 Komposisi SDM Organisasi 2

BAB II PELAKSANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 4

2.1 Tujuan 4

2.2 Sasaran 5

2.3 Perjanjian Kinerja..... 5

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 6

3.1 Capaian Kinerja Organisasi..... 6

3.2 Capaian Indikator Kinerja 2022 6

BAB IV PENUTUP..... 10

4.1 Kesimpulan 10

4.2 Langkah-Langkah Perbaikan 11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKIP berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Laporan Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 merupakan laporan kinerja yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran dan target kinerja yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022 sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2022, yang dijalankan dengan berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government*).

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja ini disusun untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program/kegiatan dan sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Kinerja juga bermanfaat sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, selain itu Laporan Kinerja juga memberikan informasi terkait keberhasilan, kegagalan, kendala, dan solusi yang dilakukan oleh suatu instansi dalam rangka mewujudkan capaian kinerjanya.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah selanjutnya Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan struktural pada Perangkat Daerah, Biro Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Biro yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Biro Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang kepala biro, yang mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang bina mental spritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, serta menyelenggarakan pelayanan administratif sesuai pembedangan tugas.

1.4 Komposisi SDM Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2022 sebanyak 44 orang, yang selanjutnya diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1 Komposisi SDM Berdasarkan Gender

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	17 Orang
2.	Perempuan	27 Orang
Total		44 Orang

Tabel 2. Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Doktor (S3)	-	-	-
2.	Magister (S2)	6 Orang	7 Orang	13 Orang
3.	Sarjana (S1)	8 Orang	19 Orang	27 Orang
4.	Sarjana Muda (D3)	-	-	-
5.	SLTA/SMK	2 orang	1 Orang	3 Orang
6.	SMP	1 Orang	-	1 Orang
Total		17 Orang	27 Orang	44 Orang

Tabel 3. Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Eselon II	1 orang	-	1 orang
2.	Eselon III	-	-	-
3.	Eselon IV	-	1 Orang	1 Orang
4.	Fungsional Tertentu	5 orang	5 orang	10 orang
5.	Staf	11 Orang	21 Orang	32 Orang
Total		17 Orang	27 Orang	44 Orang

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 2018-2023 adalah **“Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”**.

Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Kelima pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2023 yang *“Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas”* serta *“Berkarakter”*.

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tersebut didukung oleh misi sebagai upaya-upaya umum dalam pencapaian visi yaitu:

1. Pemerintahan yang Berorientasi Melayani, Inovatif dan Berkarakter;
2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel;
3. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif.
4. Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif.
5. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk Sumber Daya Alam yang berkelanjutan

Biro Kesejahteraan Rakyat Sekrateriat Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu unit kerja yang berada dibawah koordinasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengemban Misi Pertama yaitu **“Pemerintahan yang Berorientasi Melayani, Inovatif dan Berkarakter”** dan misi keempat yaitu **“Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif”**.

2.1 Tujuan

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurung waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat untuk mewujudkan kualitas SDM yang berkarakter.
2. Meningkatkan efektivitas tata kelola dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi utama Sekretariat Daerah;

2.2 Sasaran

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka telah pula ditetapkan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan bahan pendukung dalam rangka penanganan kesejahteraan rakyat berlandaskan nilai-nilai agama.
- 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah;

2.3 Perjanjian Kinerja

Untuk tahun 2022 Perjanjian Kinerja Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah ditetapkan sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan bahan pendukung dalam rangka penanganan kesejahteraan rakyat berlandaskan nilai-nilai agama	Jumlah Ketersediaan Dokumen pendukung kebijakan Bidang Mental dan Spritual yang Dimanfaatkan Bagi Pimpinan	2 dokumen
		Jumlah Ketersediaan Dokumen pendukung kebijakan Bidang Pelayanan Dasar yang Dimanfaatkan Bagi Pimpinan	3 dokumen
		Jumlah Ketersediaan Dokumen pendukung kebijakan Bidang Non Pelayanan Dasar yang Dimanfaatkan Bagi Pimpinan	3 dokumen
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	1. % Capaian Kinerja Perangkat Daerah 2. Nilai Sakip Perangkat Daerah 3. % Tindak Lanjut Hasil Temuan LHP (Temuan Bahan Material)	98 % 70 (BB) 99.99 %

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 <	Sangat Tinggi
2.	76 < 90	Tinggi
3.	66 < 75	Sedang
4.	51 < 65	Rendah
5.	< 50	Sangat Rendah

4.1 Capaian Indikator Kinerja 2022

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggambarkan capaian kinerja sasaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022. Adapun uraian kinerja menurut sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatkan bahan pendukung dalam rangka penanganan kesejahteraan rakyat berlandaskan nilai-nilai agama

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu "Pembangunan Manusia yang kompetitif dan inklusif, dan tujuan "Meningkatkan rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat untuk mewujudkan kualitas SDM yang berkarakter". Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis pencapaian kinerja sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	% ketersediaan bahan pendukung kebijakan bidang kesra yang dimanfaatkan bagi Pimpinan	9 dok	8 dok	88,89 %
Rata-rata Capaian				88,89 %

Berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran strategis 1 yaitu : **“Meningkatkan bahan pendukung dalam rangka penanganan kesejahteraan rakyat berlandaskan nilai-nilai agama”**, dengan realisasi capaian kinerja yaitu 88,89 % sehingga capaian kinerja sasaran strategis 1 ini tercapai dengan kriteria **tinggi**.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022
1.	% ketersediaan bahan pendukung kebijakan bidang kesra yang dimanfaatkan bagi Pimpinan	9 dok	8 dok	8 dok

Berdasarkan uraian indikator kinerja yang ada pada Sasaran 1, persentase capaian adalah 88,89 % dengan penjelasan sebagai berikut, pencapaian rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat dapat dicapai secara 88,89 %, dengan melaksanakan berbagai kebijakan di bidang :

1. Bidang Mental dan Spritual, dapat tercapai 100 persen.
2. Bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan dasar, dapat tercapai 100 persen.
3. Bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, tidak dapat tercapai 100 persen.

Dari uraian diatas rata-rata capaian indikator untuk sasaran pertama adalah 88,89 persen.

Sasaran 2
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

Target dari realisasi indikator keberhasilan tercapainya sasaran ini diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
1.	% Capaian Kinerja Perangkat Daerah	98 %	96,5 %	98,47 %
2.	Nilai Sakip Perangkat Daerah	80,00 (BB)	Belum ada hasil penilaian	Belum ada hasil penilaian
3.	% Tindak Lanjut Hasil Temuan LHP (Temuan Bahan Material)	99,99 %	100 %	100%

Untuk indikator pertama yaitu persen capaian kinerja perangkat daerah dapat dicapai sebesar 96,5 %. Dalam perolehan capaian indikator kinerja untuk sasaran pertama dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pemenuhan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.
2. Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dapat tercapai dengan baik.
3. Dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu berjalan sesuai yang diharapkan berupa Penyusunan RKA, RKAP, DPA, DPPA, Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja

(RENJA), Perubahan RENJA, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) dan Laporan Akhir Tahun.

- 4. Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi bidang mental dan spritual dapat berjalan dengan baik, meskipun dalam penyaluran dana hibah bidang mental dan spritual tidak dapat dicapai sepenuhnya disebabkan Lembaga calon penerima hibah tidak dapat melengkapi dokumen yang disyaratkan dalam proses pencairan
- 5. Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dapat berjalan dengan baik, meskipun dalam penyaluran dana hibah Pendidikan tidak dapat dicapai sepenuhnya disebabkan Lembaga calon penerima hibah tidak dapat melengkapi dokumen yang disyaratkan dalam proses pencairan.
- 6. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dapat berjalan dengan baik, meskipun terdapat kebijakan terkait hibah penerbangan yang belum dapat ditindaklanjuti.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2022	Target Jangka Menengah
1.	% Capaian Kinerja Perangkat Daerah	98,47 %	100 %

Untuk indikator kedua yaitu nilai SAKIP perangkat daerah tahun 2022 sampai dengan disusunnya laporan ini belum dilakukan penilaian.

Untuk indikator ketiga yaitu persen tindak lanjut hasil temuan LHP (Temuan Bahan Material) tahun 2021 dapat dicapai 100 %, dalam menjalankan tupoksinya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 telah melakukan pemeriksaan regular untuk tahun 2022, semua rekomendasi pada LHP telah ditindaklanjuti.

BAB IV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja bermakna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2022, juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 adalah sangat baik, karena terdapat indikator memenuhi kriteria sangat tinggi dan indikator memenuhi kriteria tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2022, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Bagi instansi di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab. Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

5.2 Langkah-Langkah Perbaikan

1. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu ke target yang telah ditentukan.
2. Hasil yang telah dicapai kiranya dapat ditindaklanjuti lebih lanjut.

Makassar, Januari 2023
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat

IQBAL NADJAMUDDIN, SE
Pangkat Pembina Tk. I
NIP.19740701 200212 1 003